



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 9 September 2024
Waktu Rapat	: Pukul 15.12 s.d. 16.12 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-PG)
Acara Rapat	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 20 dari 48 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-PG) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (Wakil Ketua/F-PDIP) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 5 orang Anggota dari 10 Anggota: 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 3. Riyanta, S.H. 4. H. Heru Sudjatmoko 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 3 orang Anggota dari 7 Anggota: 1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.

2. Agung Widyantoro, S.H., M. Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Prasetyo Hadi
 2. Heri Gunawan, S.E.
 3. Drs. Difriadi
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
1 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0 orang Anggota dari 4 Anggota:
-
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
4 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Reza Oktoberia, S.H.
 2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
 3. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
 4. H. Mohammad Muraz, M.M.
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
 2. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
1 orang Anggota dari 2 Anggota:
 1. Dra. Hj. Munawaroh

B. UNDANGAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
(Mayor Inf. (Purn.) H. Agus Harimurti Yudhoyono,
M.Sc., M.P.A., M.A.)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
beserta seluruh jajaran,**

Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua. Sehingga, kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terutama tugas konstitusional buat kami di bidang anggaran dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan sekretariat, karena kita dari pagi sudah rapat, ini rapat yang ketiga. Maka, saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan oleh karena itu, perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.12 WIB)

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami.

Dan saya tidak tahu kenapa hari ini cuma sendiri, yang lain-lain gabung-gabung. Mungkin karena ulang tahun. Selamat.

Tadi pagi kami dengan Mendagri, DKPP, BNPP, dan OIKN. Tadi siang dengan Mensesneg, Seskab dan KSP. Jadi, mereka bertiga-bertiga. Ini cuma sendiri saja.

Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Partai Demokrat yang ke-23. Tidak tahu entah kebetulan atau tidak, saya berempati dengan jasanya warna yang sama.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kita ini agendanya tunggal. Sekaligus, saya menawarkan dan minta persetujuan buat kita semua. Agenda kita adalah membahas tentang penyesuaian RKA-K/L, RAPBN Tahun 2025, dan sekaligus nanti pengambilan

keputusan dan penetapan RAPBN Tahun 2025. Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Dan seperti biasanya, ini tahun kelima ya, dan di Komisi II ini membahas anggaran ini enggak perlu lama-lama. Karena Komisi II ini juga enggak macam-macam, Pak, orang-orang baik semua. Karena terlalu biasa bicara huruf-huruf, jadi kalau mau bicara angka-angka itu enggak perlu terlalu lama-lama. Karena *toh*, juga segitu-segitu saja *toh*.

Oleh karena itu, kita enggak perlu lama-lama juga. Tadi dengan tiga Kementerian/Lembaga, enggak sampai satu jam, ya. Enggak sampai satu jam. Saya kira nanti kita ya mudah-mudahan bisa selesai jam 16.00, ya. Ya, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karena itu, kami persilakan kepada Saudara Menteri. Jadi, tidak usah terlalu detail penjelasannya. *Toh* juga kita sudah membahas kemarin di konsinyering ya, sudah tuntas sudah banyak yang dielaborasi. Ini tinggal sampai *highlight*-nya saja.

Kami persilakan, Pak.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Pimpinan Bapak Ahmad Doli Kurnia,
Bapak Junimart Girsang, dan
Segenap Anggota Komisi II DPR RI yang saya cintai dan muliakan,**

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam rapat kerja sore hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas peran serta dan dukungan positif dari segenap Anggota Komisi-II DPR RI dalam setiap program kegiatan dan anggaran Kementerian ATR/BPN.

Utamanya, terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI pada saat pelaksanaan *Reforma Agraria Summit*, di Bali. Dan saat mendampingi kami ketika terjun langsung ke masyarakat di daerah-daerah yang kami kunjungi.

Sebagaimana disampaikan dalam Surat Undangan Nomor B.10/25/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Kerja hari ini membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2025. Adapun agenda akan membahas:

1. pagu anggaran 2025; dan
2. prioritas kegiatannya.

Insya Allah, rapat kerja ini akan menghasilkan *output* yang optimal untuk menghasilkan keputusan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam penentuan pagu anggaran bagi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025.

Sebelum membahas agenda pertama tentang pagu anggaran, izinkan kami melaporkan perkembangan capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Agustus yang lalu.

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024 dari alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp8,23 triliun. Termasuk di dalamnya, tambahan dari optimalisasi penggunaan sumber dana PNBPN sebesar Rp620 miliar. Telah terealisasi sebesar 4,75 triliun atau sebesar 57,77%. Capaian ini, *insya Allah*, lebih baik dari tahun lalu di mana realisasi dari Januari hingga Agustus 2023 adalah 52,45%.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan rencana program kegiatan dan anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025. Sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor S-612/2024 dan B-480/2024, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000,00. Angka ini sama persis dengan pagu indikatif sebagaimana kami laporkan kepada Komisi II DPR RI pada tanggal 11 Juni 2024.

Namun dalam rinciannya ada sedikit penyesuaian untuk beberapa program:

- Khusus untuk program dukungan manajemen, tidak ada perubahan yakni sekitar Rp4,27 triliun; sedangkan
- Untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, ada penyesuaian dari laporan pada pagu indikatif dari sekitar Rp2,03 triliun menjadi Rp2,02 triliun; dan
- Untuk program penyelenggaraan penataan ruang, ada penyesuaian dari sekitar Rp143 miliar menjadi Rp156 miliar.

Sehingga ada pengalihan sebesar Rp13 miliar dari program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ke program penyelenggaraan penataan ruang. Penyesuaian anggaran ini diselaraskan dengan penyesuaian target capaian.

Adapun sumber dananya tidak mengalami perubahan, terdiri dari:

- Rupiah murni sebesar Rp4,53 triliun dan
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,92 triliun.

Kemudian berdasarkan hasil Rapat Panitia Kerja RAPBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN diberikan target PNBPN sebesar Rp3,2 triliun untuk tahun 2025. Ada kenaikan Rp200 miliar dari target tahun sebelumnya, yakni Rp3 triliun di tahun 2024.

Terkait distribusi anggaran per eselon 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk Sekretariat Jenderal Rp6,03 triliun;
2. Inspektorat Jenderal Rp28,53 miliar;
3. Ditjen Tata Ruang Rp131,19 miliar;
4. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Rp69,70 miliar;
5. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Rp38,57 miliar;
6. Ditjen Penataan Agraria Rp21,81 miliar;
7. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Rp21,18 miliar;
8. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Rp78,74 miliar; dan
9. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Rp27,84 miliar.

Total keseluruhan Rp6,45 triliun.

Mengacu kepada pagu indikatif, ada penyesuaian penempatan alokasi dana. Hal ini disebabkan oleh penyusunan pagu indikatif mengacu pada sistem *bottom-up*, di mana masing-masing Kantah dan Kanwil diminta untuk mengajukan alokasi rencana anggaran sesuai dengan rencana target capaian masing-masing Direktorat Jenderal.

Sedangkan, pada penyusunan pagu anggaran dilakukan secara *top-down* menyesuaikan hierarki pelaporan keuangan sesuai struktur organisasi. Untuk itu, anggaran Sekretariat Jenderal tersebut meliputi juga anggaran program dan kegiatan satuan kerja daerah, baik Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sehingga, ada penyesuaian belanja non operasional untuk Sekretariat Jenderal yang sebelumnya hanya 143, saya ulangi sebelumnya hanya Rp413 miliar menjadi Rp2,3 triliun. Penyesuaian ini atas arahan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, meskipun ada penyesuaian penempatan anggaran, tetapi jumlah total pagu anggaran tetap sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp6,45 triliun. Dari jumlah total tersebut, pagu anggaran untuk:

- belanja operasional sebesar Rp3,78 triliun; dan untuk
- belanja non operasional sebesar 2,67 triliun.

Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan, belanja non

operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan *output* utama yang telah ditetapkan.

Untuk *output* utama pada program pengembangan data dan informasi, terjadi penyesuaian target yang diakibatkan oleh sudah tercapainya target *output* utama, khususnya pada kantor layanan elektronik. Sebagai contoh, pada saat awal saya menjabat kantor layanan elektronik baru mencapai 10 satker. Target tahun 2024 yang menerapkan layanan elektronik sejumlah 104 satker. *Alhamdulillah*, berkat kerja keras dan sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN hingga akhir Agustus 2024, kita telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 satker dari 492 satker yang ada. Artinya, selama ini, selama kepemimpinan saya, capaian target kantor layanan elektronik naik sebesar 400% atau 4 kali lipat dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk melaksanakan sertifikasi elektronik secara masif. Dengan semakin banyaknya satker yang mengimplementasikan layanan elektronik, maka jumlah sertifikat elektronik pun akan semakin masif. Terbukti jumlah sertifikat elektronik selama 6 bulan terakhir ini, meningkat 38 kali lipat dari 19.802 sertifikat menjadi 770.612 sertifikat.

Dengan semakin banyak bidang tanah yang tersertifikasi elektronik, maka secara kepastian hukum aset rakyat akan semakin terlindungi dari upaya kejahatan di bidang pertanahan. Sementara, secara ekonomi rakyat akan semakin memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha.

Namun karena adanya penurunan target dalam layanan elektronik, maka alokasi anggaran untuk layanan elektronik dapat dialokasikan penempatannya untuk pengukuran dan pemetaan kadastral. Karena itu, terjadi peningkatan target hampir dua kali lipat dari 2.644.147 bidang tanah menjadi 4.293.959 bidang tanah. Peningkatan ini juga merupakan implementasi dari usulan masing-masing Kantor Pertanahan.

Sementara itu,

Bapak/Ibu sekalian,

Output utama dari masing-masing program kegiatan lainnya tidak banyak mengalami perubahan, seperti tercantum dalam pagu indikatif sebagaimana telah kami laporkan pada bulan Juni yang lalu.

Bapak/Ibu sekalian yang kami muliakan,

Pada rapat kerja ini, saya ulangi, pada rapat kerja kita sebelumnya, kami mengapresiasi perhatian dan dukungan dari para Anggota Komisi II DPR RI untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN dari pagu indikatif yang kami terima. Kami juga telah melakukan tindak lanjut dari rapat kerja tersebut dengan melakukan koordinasi secara intensif baik dengan

Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.

Tetapi sebagaimana yang telah kami laporkan tadi dalam pagu anggaran tahun 2025 ini pun, jumlah yang ditetapkan sama dengan jumlah pagu indikatifnya. Untuk itu, kami menerima pagu anggaran ini dan akan berupaya untuk melakukan pengelolaannya sebaik mungkin agar *output*-nya tetap optimal.

Yang saya muliakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI,

Ke depan, rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun 2025, telah merujuk pada rancangan tema rencana kerja pemerintah RKP tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas kegiatannya sebagai berikut:

1. Pertama, digitalisasi data pertanahan. Khususnya, layanan elektronik dan sertifikat elektronik;
2. Dua, akselerasi pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dan lengkap PTSL;
3. Tiga, manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat *reform* agraria. Yang terdiri dari aset *reform* yaitu dari distribusi tanah dan akses *reform* yang merupakan *major project* dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
4. Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dukungan terhadap pembangunan nasional;
5. Kelima, pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas;
6. Keenam, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
7. Ketujuh, percepatan rencana tata ruang dan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; dan
8. Kedelapan, reformasi birokrasi termasuk penguatan zona Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang difokuskan pada:
 - penguatan kelembagaan;
 - penerapan *human capital management*;
 - penguatan kerangka regulasi;
 - tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; serta
 - penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI,

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja hari ini. Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024 dan 2025 mendatang, dukungan serta pendampingan dari para Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat akan terus menyertai kami.

Pada kesempatan yang baik ini, kami juga melaporkan bahwa selama masa jabatan saya dari 39 aspirasi yang kami terima dari Komisi II DPR RI, kami telah berupaya maksimal untuk menindaklanjuti dan menghadirkan solusinya. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami.

Selanjutnya, dengan akan berakhirnya masa bakti kita dalam periode 2019-2024 ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas sinergi, kolaborasi, komitmen dan dedikasi Bapak/Ibu yang tiada henti.

Kami mohon maaf jika dalam kebersamaan ini ada tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga perjalanan kebersamaan kita yang singkat ini akan terus menginspirasi kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara di mana pun kita kelak berada.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Menteri ATR.

Bapak/Ibu sekalian,

~~Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan disampaikan oleh Saudara Menteri.~~

Kami persilakan Pak Junimart. Siapa lagi? Ibu Munawaroh, Pak Teddy.

Bu Rezka sama Pak Ongku enggak ya?

Enggak. Baik.

Silakan, Pak.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kepada kita semua,

**Bapak/Ibu,
Saudara Menteri ATR/BPN yang kami banggakan,**

~~Saya tidak bertanya, tetapi saya ingin memberikan koreksi dan masukan-masukan kepada ATR/BPN. Ada dua poin paling pokok menurut saya~~

dan ini menjadi pergumulan ya, ATR/BPN di daerah-daerah. Saudara Menteri, ya.

Sebelum masuk ke sana yang menyangkut masalah hukum, saya ingin sampaikan tentang STPN. STPN adalah sekolah kedinasan yang mestinya setelah selesai sudah langsung CPNS. Sama seperti IPDN, STAN terus Sekolah Keimigrasian, ya.

Dan sewaktu pertemuan di Jogja, saya sudah sampaikan. Walaupun ada, bukan rencana, bukan wacana, rencana untuk membuat dalam bentuk Politeknik, ya. Ini kan STPN ini 2,3 hektar kalau saya tidak salah ya, Pak Dalu, yang di Jogja itu dan sangat apa namanya luar biasa mestinya, Saudara Menteri. Dan banyak peminatnya walaupun mereka tahu setelah selesai tidak, tidak segampang itu menjadi CPNS.

Nah, yang kedua. Sesungguhnya, STPN itu ya, karena kami sering ke daerah, juru ukur itu sangat kurang sekali ya, di ATR/BPN, ya. *Nah*, bagaimana caranya ya, dengan semangat untuk memberantas mafia tanah ini, kuncinya, menurut saya, salah satu juru ukur. Di samping *warkah-warkah* yang palsu, di samping, apa namanya, KKN, yang paling pokok Saudara Menteri adalah juru ukur. *Nah*, ini yang harus diperhatikan dalam rangka STPN.

Dan saya sudah bicara ke Pak Dalu dan Pak Dirjen yang *lāin*, bahkan ke Pak Sekjen, supaya melakukan, apa namanya, koordinasi komunikasi kepada IPDN. Bagaimana caranya? Ini kan masalah komunikasi sebenarnya, ya. Komunikasi supaya betul-betul STPN itu menjadi favorit seperti IPDN. Ini perlu Pak, apa namanya, Wamen, ya.

Nah, yang kedua Saya bicara menyangkut hukum. Di awal saya sudah sampaikan bahwa saya enggak tahu apakah ini sudah, sudah dilakukan komunikasi koordinasi kepada para petinggi APH, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, dan kepada Ketua Mahkamah Agung, ya. Dan tidak perlu MoU, ya. hanya perlu sepemahaman bahwa masalah tanah ini masalah paling pelik dan yang paling tahu masalah pertanahan adalah ATR/BPN.

Maka dari awal sampaikan di tingkat kepolisian harus ada orang BPN ya, yang sifatnya *perbantuan*. *Perbantuan*. Kenapa demikian? Karena di tempat lain juga begitu, Pak. Ketika masalah pajak mulai penyelidikan di kepolisian, ada orang pajak, Pak, di sana yang memberikan pemahaman, ya. Supaya tidak *error-in-persona* dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang.

Nah, yang kedua. Terus terang dalam praktik itu ya, dari dulu saya sudah bilang, ya. Tumpang tindih regulasi pertanahan itu menjadi beban kepada ATR/BPN. Padahal ya, yang kita pelajari, yang saya pelajari, saya bolak-balik bukunya itu ya, kerja-kerja ATR/BPN ini tidak pernah kerja yang menyangkut pidana, Pak. Selalu sanksi administrasi, karena dia persuratan, Saudara Menteri. Jadi. kalau mau di, apa namanya, sengkatakan ke PTUN, Pak. Kecuali, dia OT.T. Kecuali, dia suap.

Jadi, kalau orang mengatakan ATR/BPN itu dalam menirukan sertifikat, ya, melanggar hukum pidana, menurut saya itu terlalu jauh. *Nah*, pemahaman ini harus kita sampaikan, kepada kepolisian, kepada Kejaksaan, kepada Mahkamah Agung. *Nah*, karena kalau teman-teman di bawah sana ketakutan, maka tujuan mulia, ya, dari kerja-kerja ATR/BPN yang tanah untuk rakyat, sertifikat menjadi dokumen, satu-satunya yang bisa untuk menunjang usaha rakyat, itu enggak mungkin terwujud, Pak.

Belum lagi nanti sertifikat yang sudah 15 tahun, ya, tapi dengan SK Menteri KLHK, ya, menyatakan bahwa dalam sertifikat misalnya itu 100 meter tetapi ada 5 meter menjadi kawasan hutan, ini kan tidak bisa diakomodir untuk diagunkan ke bank. *Nah*, ini Pak. Pak Jokowi sudah sering bilang bahwa PTSL ini gunanya ini dan Bapak/Ibu bisa, apa namanya, membantu untuk berdagang, bisa diagunkan ke bank. Faktanya tidak bisa, Pak. *Nah* ini, ini perlu dikomunikasikan juga dengan KLHK, ya.

Saya dengan tegas mengatakan KLHK itu, LHK itu, tidak punya hak atas tanah, Pak. Coba baca undang-undangnya. Tidak pernah dalam satu, satu garis pun mengatakan mereka punya tanah. Tetapi, hamparan tanah. Begitu Pak. *Nah*, walaupun mereka punya tanah, walaupun punya tanah Pak, kan logikanya mereka harus mendaftarkan tanahnya Pak, ya. Dan hal itu tidak pernah punya sertifikat, Pak. Tetapi, mereka selalu mengklaim kawasan hutan. Saya juga bingung dari mana titik koordinat mereka bisa tunjuk kawasan hutan itu, Pak.

Yang kedua, Pak. Perlu dalam rangka untuk memayungi ATR/BPN ini dari tingkat Kanwil kepada Kantah itu ya, dihidupkan kembali PPNS. PPNS. Seperti di Kementerian lain. Di pertanian juga ada, di KLHK apalagi, Pak. Ketika APH mau melakukan penyidikan, itu harus limpahan dari PPNS, iya kan? Ada APIP, ada Irjen. *Nah*, ini yang mesti-mestinya melakukan penyelidikan di sana, ya. Lalu, penyidikan dilempar ke APH, Pak.

Ini kita harus sepakati *nih*, Pak Tejo. Harus sepakati ini, Pak. Ya kan, tidak *kucuk-kucuk* nanti polisi memanggil, apa namanya, kasi saja. Panggil kasi, proses, terus ada peringatan, "Tolong datang hari Jumat sekaligus bawa celana pendek dan sandal. Ini fakta, Pak. Ini di daerah, daerah NTT ada, ada Pak. NTT ada ini. *Nah*, ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab Komisi II juga, iya kan?

Jadi, jangan, apa namanya, kita berbicara tentang semangat *reforma* agraria, tetapi kawan-kawan di Bapak apa takut kerja Pak. Iya, kan? *Nah* makanya perlu, ya. Kalau di pengadilan perlu hakim ad hoc. Perlu, Pak. Ini mesti dikomunikasikan, Pak.

Kita jangan bermimpi membuat peradilan pertanahan. Saya sudah coba pikir-pikir enggak mungkin Pak, ya. Kalau sampai itu terjadi maka Pengadilan Negeri akan kosong perkara di sana. Iya kan, 78% itu perkara tanah di Indonesia ini, Saudara Menteri. Iya, kan?

Nah, kalau disebutkan apa namanya oleh Mahkamah Agung, "Sulit, Pak Hakim." Kenapa sulit? Ya, kan. Kenapa perpajakan bisa, kenapa perikanan bisa, Pak? Zaman saya Komisi III saya usulkan, bisa *tuh*. Kan begitu, ya. Biar, apa namanya, teman-teman bisa nyaman semua di sana, ya.

Belum lagi misalnya, saya sudah sampaikan dan saya *greget* Pak, tentang saksi ahli itu. Segerakan Pak, ya. Tidak perlu izin dari Mahkamah Agung. Tidak perlu, Pak. Mereka hanya, apa namanya, setelah kita menyertifikasi mereka hanya mengetahui saja. Hukumnya sama kayak pengacara, Pak. Kita yang melakukan kursus/pelatihan, kita yang, kita yang, kita yang melantik. Tetapi, ketika melakukan sumpah, Mahkamah Agung, Pak.

Ah, itu. Itu tahapannya, Pak. Mereka menyumpah ya, ahli juga begitu. Jadi, jangan seperti selama ini ahlinya itu-itu saja Pak, akademisi. Mohon maaf saya juga akademisi Pak, ya kan? Tapi, kan belum tentu akademisi paham tentang praktik pertanahan. Ini perlu. Ya, biar semua kita punya legasi juga. Ya, syukur-syukur, *alhamdulillah*, Pak Menteri masih tetap di ATR/BPN, Pak. Masih bisa melanjutkan. Iya kan?

Jadi, perlu sekali, Pak. Dan akan banyak peminatnya. Seseorang akan menjadi ahli Pertanahan ketika dia sudah mendapat sertifikasi dari ATR/BPN. *Nah*, itu kan menambah anggaran juga dengan tidak melanggar hukum. *Nah*, itu.

Terus, yang berikut. Bagaimana status tanah yang sudah bersertifikat yang masuk kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan dari KLHK? Bagaimana caranya supaya tidak jadi masalah? Ya, ini harus masuk atau dijadikan menjadi APL. Ini saran dari kami, Pak.

~~Ini kita diskusikan di Komisi II karena inilah menjadi, apa, masalah hukum, ya. Tanah yang sudah bersertifikat itu ternyata masuk dalam kawasan hutan. Tetapi, undang-undang KLK belum ada. Itu kan muncul terakhir, Pak. Yang paling parah Pak SK Menteri bisa mengalahkan undang-undang. Ini mesti dikomunikasikan kepada Presiden mengenai ini Saudara Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Wamen, dan Bapak Ibu semua dari ATR/BPN.~~

Yang kedua, menyangkut aset. Ini sampai sekarang Pak Sekjen dan, saya kira, Pak Tejo paling paham ini mengenai aset terkait pelaksanaan putusan pengadilan untuk pembatalan sertifikat atas bidang tanah yang merupakan aset pemerintah, ya. BUMN dan lain-lain. Dan ini menjadi dilematik bagi para Kepala Kantor Pertanahan. Karena kalau mereka melaksanakan sistem pengadilan, maka dianggap penghilangan aset pemerintah, Pak. Maka, banyak yang terkendala.

Sekarang putusan pengadilan tidak bisa eksekusi karena itu aset pemerintah. Padahal kalau disebut aset pemerintah, dia tidak punya surat. Dia hanya menguasai. Maka, ketika itu dia aset pemerintah harus didaftarkan juga di pertanahan, Pak. Ini sangat perlu, Pak. Sangat perlu kita perhatikan supaya betul-betul punya kepastian hukum. Supaya betul-betul, apa namanya,

sertifikat itu, ya, memang menjadi dokumen yang paling utama dan tidak bisa diganggu gugat.

Nah, yang terakhir, Pak. Saya tekankan, ya. Urusan pertanahan itu 99% menyangkut masalah administrasi. Kecuali, dia suap dan OTT. *Nah*, ini kita mesti samakan persepsi dengan para APH, Pak. Supaya semua bisa nyaman, supaya para Kakanwil, Kakantah itu ya, dan para Kasi bisa bekerja baik.

Jangan seperti kasus di Sumbar ini. Bu, Bu, apa, Bu Embun paling paham *nih*, ya. Ke Kanwil Sumbar itu dibolak-balik dipanggil APH Pak, ya. Perkara-perkara dulu, ya. Tetapi karena urusan pribadi, beliau dipanggil bolak balik, Pak. Saya tidak mengatakan saya sudah, sudah telepon Kapoldanya atau "Wah, Kapoldanya." Enggak. Tapi, saya jelaskan, "Begini *loh* masalahnya". Itu apa masalahnya.

Ini masalah pribadi Pak, bisa dibawa-bawa. Padahal itu Ibu Dewi itu enggak ada salahnya *tuh*. Dia hanya menjalankan, menjalankan undang-undang, Pak. Ini, Pak. Ini sangat perlu Saudara Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan sekarang Plt. Irjen, Pak, Pak Dalu ya? Pak Dalu. APIP-nya Pak, tolong diaktifkan. APIP-nya tolong diaktifkan. APIP itu sangat pokok.

Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya. Supaya, perbedaan pemahaman tentang tanah negara. Tanah negara menurut Undang Undang Agraria, yaitu tanah yang belum dilekati suatu hak dan pemahaman oleh aparat negara APH itu, ya. Tanah milik pemerintah, perlu adanya kesamaan persepsi antara BPN dan APH. Ini disamakan Pak, persepsinya, apa itu, tanah pemerintah, tanah negara. Yang pasti negara tidak pernah punya tanah, Pak. Mereka hanya menguasai tanah, ya, untuk diberikan kepada masyarakat. Itu filosofinya.

Kalau disebut di, apa namanya, di, apa, tanah ini milik negara, itu salah, Pak. Tapi, tanah ini dikuasai negara. Itu yang benar. *Nah*, ini kan mesti disampaikan kepada APH ini. Yang begini-begini Pak Dalu, Pak Sekjen, dan Pak Tejo, dan teman-teman Ditjen.

Demikian, Ketua.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak perlu dijawab ini, Pak. Masukan saja.

F-P.DEMOKRAT (WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih, Pak Junimart.

F-P.DEMOKRAT (WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Izin, Ketua.

Karena kita *nih* agendanya agenda Tunggal, saya berharap kalau bisa kita lebih fokus dulu kepada masalah anggaran.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya. Terima kasih, Pak.

Bu Munawaroh.

F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Saudara Menteri ATR/BPN serta,
Teman-teman Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Pertama, terkait dengan niat baik untuk meningkatkan dari STPN ke Politeknik. Ini perlu benar-benar dipersiapkan baik anggaran maupun prodi yang nanti benar-benar akan bermanfaat terkait dengan BPN ini.

Kemudian, yang kedua. Kami menyampaikan apresiasi terhadap kementerian yang sudah menyelenggarakan ataupun melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah dengan pendaftaran dengan program PTSL. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat dapil saya yang, yaitu di Dapil Jateng X. Karena, di sana banyak sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan PTSL.

Tetapi, kemudian ada masalah. Yang ternyata kalau di kabupaten, salah satu kabupaten, itu dari target 49, sekarang itu baru sekitar belum ada 2000. Itu ternyata ada kaitannya dengan ketidak-sediaan dari perangkat desa untuk menjadi panitia. Sehingga, mungkin saya mengusulkan untuk bisa koordinasi dengan kementerian yang berkaitan dengan desa. Karena kalau Kepala Desa itu diperintah oleh, misalnya, dari Kemendagri, itu mungkin akan apa cepat melaksanakannya. Sehingga kalau ada koordinasi dengan Kementerian yang terkait dengan desa, mudah-mudahan PTSL ini bisa benar-benar, apa, dilaksanakan.

Karena, kita di capaiannya terlalu sedikit karena banyak perangkat desa yang tidak bersedia menjadi panitia. Karena, kan untuk PTSL di dapil saya itu

hanya sekitar 150.000. Tapi, kalau nanti tidak melalui PTSL, kan langsung mengadakan sendiri. Itu kan lewat desa, mungkin. Desa akan mendapatkan, apa, ada, ada yang diharapkan. Kan begitu. Tapi kalau dengan PTSL, ini kan tidak mendapatkan apa-apa.

Tapi, tujuan kita kan bagaimana kita *tuh* melindungi, melayani pada masyarakat. Sehingga, tetap PTSL dilaksanakan. Tapi, bisa berkoordinasi dengan Kementerian yang lain. Sehingga, nanti desa-desa, semua perangkat desa, itu akan siap untuk melaksanakan ini.

Saya kira itu dari saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih, Bu Munawaroh.

Pak Teddy.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.Sos.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Pak Menteri dan jajarannya,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya saya memberikan apresiasi dengan digitalisasi data pertanahan ini. Karena, menurut saya ini juga sebuah keniscayaan. Pak Menteri, ya? Bahwa kita juga ingin agar seluruh daerah di Indonesia bisa terdata dengan baik bidang tanahnya, bahkan tersertifikatkan. Dan karena eranya sudah masuk ke era digital, maka digitalisasi ini menjadi penting.

Hanya tinggal yang harus dipikirkan adalah bagaimana upaya terus-menerus baik secara pasif maupun aktif. Saya katakan secara pasif atau aktif. Itu adalah aktif karena nanti masyarakat yang datang ke kantor BPN, kemudian nanti diselesaikan dengan sertifikat digital keluarannya. Dan yang pasif maksud saya adalah juga data-data yang di ATR/BPN yang mungkin tidak diminta masyarakat. Ini bisa lebih baik dimigrasikan.

Karena itulah kemudian berkaitan dengan anggaran juga penting diperhatikan. Saya tidak melihat dari sisi anggarannya. Tapi, saya minta untuk supaya ini juga terus ditingkatkan. Karena, ini juga hal yang memang menjadi penting bagi kita. Miris, ya, saya, ketika kita mendengar misalnya ada satu

kantor yang kebakaran, kemudian datanya hilang. Walaupun ini keamanan data juga penting kita terus optimalkan. Kita lakukan.

Ya, jadi jangan sampai juga yang kemarin-kemarin kita dengar. Misal, dengan bobolnya pusat data nasional juga terulang, misalnya di BPN. *Nauzubillah*, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena penting juga anggaran untuk penguatan *server* kita, supaya tidak mudah dibobol juga oleh orang. Itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan RT/RW. Dalam satu periode saya di DPR itu, RT/RW ini belum selesai. Padahal ini juga menjadi bagian dari upaya, upaya kita untuk melakukan percepatan penataan ruang ini, ya. Tentu ini bukan hanya sekedar persoalan tata ruang saja. Karena tata ruang juga disandingkan menjadi Kementerian Agraria Tata Ruang. Tapi, ini persoalan ini juga kan meliputi, bukan hanya persoalan Kementerian ATR/BPN. Tapi, ada Pemerintah Daerah. Yang mungkin juga ada, menurut saya, Kementerian Keuangan.

Penting bagi saya mungkin, atau nanti juga ke depan, Pak Menteri memastikan untuk kolaborasi koordinasi dengan Kementerian Kemendagri dan juga Menteri Keuangan. Mungkin sederhananya, ketika saya juga di DPRD Kota, satu kota, ketika diberikan insentif, itu mungkin akan mudah untuk dilakukan akselerasi. Daerah yang menyelesaikan RT/RW diberikan insentif dan daerah yang tidak menyelesaikan RT/RW diberikan juga insentifnya. *Nah*, sehingga ini jadi cepat. Setahun selesai, *insyaallah*. Setahun selesai, *insyaallah*. Ya, karena itulah kemudian penting untuk koordinasi dengan, ataupun bukan koordinasilah, kementerian untuk berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Keuangan. Dan itu menghitungnya juga mudah *kok*, menurut saya.

Ketiga, terakhir. Ini harapan saya saja Pak Menteri, untuk terus juga menyelesaikan sengketa lahan, terutama masyarakat dengan pemerintah. Baik itu BUMN, kementerian/lembaga, dan sebagainya. Upaya ini juga penting untuk adanya kepastian hukum. Kita sudah punya jejak-jejak. Kemarin, misalnya, kaitan dengan HGU di atas HPL ya, dan sebagainya. Model pola-pola begitu itu memberikan kepastian juga kepada masyarakat. Walaupun tetap sebenarnya masyarakat menuntut juga yang lebih, yaitu sertifikat.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi?

Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA, S.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada beberapa hal yang, ini saya mengulang-ulang sebenarnya. Intinya saja, yaitu berkaitan dengan pelayanan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya, yang berkaitan dengan perpanjangan HGB di atas tanah negara. Tetapi menurut penjelasan Kakanwil, itu ada surat dari Gubernur DIY yang intinya agar BPN lebih berhati-hati.

Saya hanya mengingatkan. Karena kita negara hukum, mohon hukum itu untuk betul-betul ditegakkan. Jadi, jangan sampai dicampuradukkan. Kalau berbicara persoalan pertanahan di Jogja, sebenarnya sejak munculnya Keppres Nomor 33 Tahun 1984, kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984. Yang pada intinya, Sultan Jogja waktu itu menyatakan tunduk kepada Undang-Undang 5 '60. Berarti, persoalannya sebenarnya sudah selesai. Tetapi, hari ini ternyata belum bisa diproses. Di sana *numpuk*. Ribuan, Pak Menteri.

Dulu waktu Pak Hadi sebenarnya sudah ada satu komitmen itu mau diselesaikan. Tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya ingin hal-hal yang sebenarnya secara hukum itu sudah jelas, dilakukan saja. Apalagi, kalau berbicara persoalan pelayanan yang berkaitan dengan pertanahan. Dan juga aturan internal di BPN sudah ada, yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.

Kemudian juga, saya mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, itu juga, di situ sudah jelas. Bahwa roh di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan itu adalah asas legalitas.

Jadi, saya ingin agar persoalan Jogja ini mohon untuk bisa diselesaikan secara hukum. Kalau bicara soal budaya, saya tidak akan masuk di persoalan budaya. Ini satu persoalan. Jadi, jangan sampai, mohon maaf, saya sudah beberapa waktu lalu juga saya masuk ke Panitikismo. Kemudian, juga saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Mantan Bhabinkamtibnas Keraton. Kemudian, saya juga masuk di *stakeholder* lainnya. Kami bukan pada posisi berpihak pada Sultan, bukan. Tapi, saya juga tidak pada posisi berpihak pada rakyat pemegang HGB yang mati juga bukan. Tapi, semata-mata saya ingin bagaimana agar hukum ini ditegakkan.

Kemudian juga, saya sampaikan kawan-kawan Komisi II. Ternyata, pakarnya pertanahan itu ada di STPN. Karena, beberapa pakar yang saya hubungi baik dari UGM maupun UII itu juga malah melemparkan ke STPN. *Nah*, ini barangkali nanti teman-teman Komisi II bisa menjadi referensi. Ketika ada

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah, lebih baik ke sana. Dan saya berdiskusi lama dengan beberapa ahlinya di STPN.

Kemudian, yang berkaitan dengan layanan Pertanahan di IKN. Baru tadi saya dapat kontak dari Lurah di Sungai Merdeka. Itu di Kecamatan Samboja. Itu sampai hari ini belum ada kegiatan yang berkaitan dengan jual-beli. *Lah*, bagaimana IKN itu mau, apa, mau sesuai dengan target ketika jual beli itu belum bisa dilaksanakan? Walaupun kalau saya melihat, ketentuannya itu sudah ada. Ini saya sampaikan kepada sahabat saya, Pak Wamen, yang kebetulan juga Wakil di IKN. Mohon itu untuk diperhatikan, Bapak. Agar semua itu nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita sama-sama sepakati.

Kemudian, juga yang disampaikan Mas, Bapak Junimart. Tumpang tindih juga di IKN itu begitu, Pak. Sudah dikuasai masyarakat lama, tapi tiba-tiba muncul surat dari Menteri Kehutanan kala itu. Itu kasihan. Di situ ada masjid, ada pasar, ada Kantor Kelurahan, ada Kecamatan, dan macam-macam. *Alhamdulillah*, ini Pak Isnaldi pernah di sana. Jadi, tanah-tanah *ulayat* yang juga sekarang statusnya tidak jelas, itu juga sangat banyak, Pak. Saya kebetulan ada data-datanya, tapi belum saya siapkan. Jadi, izin saya sudah beberapa kali ke sana. Mungkin sudah 6-7 kali saya ke sana. Sudah 6-7 kali sampai masuk ke pelosok-pelosok.

Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Jadi, sekali lagi Pak Menteri, saya sangat apresiasi. Dan masyarakat, mohon maaf, sangat mengapresiasi apa-apa yang dilakukan Pak Menteri. Masih muda, ganteng, pintar. Itu intinya.

Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira cukup ya, karena kita fokusnya ke masalah anggaran. Kalau pesan, ini sudah dari empat orang. Saya kira cukuplah pesannya.

Ada lagi, Pak Heru? Terakhir ya, Pak Heru.

Silakan, Pak.

F-PDIP (H. HERU SUDJATMOKO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pak Menteri yang terhormat,

Selamat dulu, Menteri kita.

Dalam pandangan saya penyertifikatan itu, baik yang manual maupun yang elektronik, itu muaranya akan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tentu potongan-potongannya tidak semuanya di BPN, ya. Hanya sayang kalau di BPN-nya misalnya sudah sukses, tapi tidak berlanjut atau tidak disambung oleh kementerian atau lembaga yang lain. Bisa jadi, tentu ada manfaatnya. Tapi tidak optimal, kalau orientasi berpikir kita pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyertifikatan tanah itu.

Nah, pertanyaan saya. Bagaimana BPN bisa mengambil peran berinisiatif? Supaya, dalam "keberhasilan BPN" dalam penyertifikatan ini tersambung untuk mencapai rakyat yang berdaya secara ekonomi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik.

Terima kasih, Pak Heru.

Jadi, apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi itu, saya kira ini menjadi catatan saja ya, masukan buat Kementerian ATR/BPN di masa-masa berikutnya. Karena, sudah lama juga sebetulnya kita sudah membicarakan hal-hal itu. Ini juga cuma aksentuasi saja atau *me-remaining* saja bahwa masih ada PR, ya, ke depan kita terkait dengan masalah pertanahan.

Nah, kita kembali masalah ke anggaran. Artinya, tidak ada satu pun dari Bapak-bapak ini yang menyampaikan soal anggaran. Berarti, enggak ada masalah begitu.

Oleh karena itu, saya, sebelum kita sampai pada kesimpulan, saya persilakan Saudara Menteri untuk menanggapi secara singkat saja, ya.

Silakan, Pak Saudara Menteri.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL RI (MAYOR INF. (PURN.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO,
M.SC., M.P.A., M.A.):**

Siap.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Kalau tadi kami mendengar, dan mencatat, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Junimart Girsang, Bu Munawaroh, Bapak Teddy Setiadi, Bapak Riyanta, dan juga Bapak Heru Sujatmoko. Secara umum sebenarnya menjadi pelecut kami untuk terus ingat bahwa pekerjaan belum usai dan terus harus dikawal dengan baik. Segala sesuatu yang menjadi masukan bahkan koreksi, saya mengucapkan terima kasih. Termasuk, khususnya tadi bagaimana kami lebih fokus pada penyiapan SDM melalui STPN. Terima kasih atas dukungannya.

Melindungi para pegawai dan pekerja kami juga penting sekali atas potensi kasus hukum. Oleh karena itu, kami terus bekerja dan berkomunikasi dengan intensif dengan jajaran Polri, Kejaksaan Agung, dan, dan juga MA. Sejumlah MoU kita lakukan. Termasuk, tadi penyiapan saksi-saksi ahli dan juga hakim-hakim yang semakin memahami dan memiliki persepsi yang sama terkait berbagai urusan agraria dan pertanahan. Sehingga, tidak ada lagi yang menjadi korban di kemudian hari.

Kemudian,

Bapak/Ibu sekalian,

Terima kasih juga tadi mengingatkan penting sekali untuk terus melakukan koordinasi ketat dengan berbagai *stakeholder* kementerian-kementerian terkait yang lain. Agar program-program PTSL maupun *reform* agraria lainnya juga bisa tepat sasaran dan semakin progresif.

Dengan demikian, kami juga ingin terus melakukan kerja internal juga. Termasuk, transformasi digital ini bisa semakin baik karena memang dibutuhkan. Tapi, juga selalu diingatkan betapa ada kerentanan. Ini harus kita jaga. Jangan sampai justru semangatnya bagus, tapi justru membahayakan untuk keamanan dan privasi data.

Pak Riyanta, terima kasih juga tadi Bapak mengingatkan. Ini memang masalah yang pelik tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi, luar biasa komitmen Bapak. Ini kami juga akan kembalikan lagi masalah hukum dan juga aturan yang berlaku.

Dan yang terakhir, terkait dengan di IKN. Tadi juga ini akan terus kita tindaklanjuti. Jangan sampai nanti berkepanjangan masalahnya.

Pak Heru, yang terakhir tadi. Pemberdayaan ekonomi mudah-mudahan ini juga menjadi fokus kita. Akses *reform*, aset *reform* ini tidak terpisahkan. Betul. Tidak ada gunanya sertifikasi tanpa ada nilai ekonomi yang bertambah bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang ada di berbagai daerah.

Demikian, Bapak Pimpinan.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga masukannya selama ini kepada kami. Dan selanjutnya, kami mohon arahan terkait dengan anggaran ke depan.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih, Saudara Menteri Agraria Dan Tata Ruang.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita bisa langsung saja masuk pada kesimpulan.

Coba ditayangkan.

Ini cuma ada satu kesimpulan saja.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan, Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Sebelum masuk ke Kesimpulan, mohon maaf saya terlambat. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri, karena ini ada titipan aspirasi dari masyarakat Labuan Batu.

Masalah *enclave* HGU dengan masyarakat dengan yang hampir 25 tahun lebih, sampai 30. *Nah*, saya juga sudah meneruskan kepada Kementerian ATR/BPN. Saya minta ini bisa dijawab secara lisan atau tertulis. Lebih bagus tertulis supaya masyarakat bisa mencari jalan. Setelah dari BPN ke mana, kalau memang BPN enggak selesai. Ini saya meneruskan awal Juni 2024.

Mungkin, supaya enggak lupa, ini saya serahkan sekarang saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya. Iya, iya.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Dapilnya, Pak Junimart.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Loh, enggak. Enggak.

Saya protes, Bapak. Dua hal, Pak. Ini pertama, datang, Bapak datang telat kasih sampai.

Yang kedua, *kok* Bapak *ngurusin* Sumatera Utara? Kami saja tadi bingung-bingung. *Kok* bisa langsung Bapak, ke Bapak begitu? Ada apa? Itu Pak Ongku dapilnya, enggak tahu dia *tuh*.

Silakan. Silakan. Silakan, Pak. Silakan.

Oke, baik.

Sudah enggak betah di Lampung, Pak? Mau pindah dapil?

Baik. Kita langsung, ya.

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000,00 dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp13.042.618.000,00 dari Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan ke Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sehingga, pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000,00;
- b. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2.021.808.943.000,00;
- c. Program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp156.066.111.000,00.

Pak Sekjen, angkanya sudah benar, sama ya? Kalau lebih sih enggak apa-apa, ya. Tapi, nanti kalau kurang. Sudah pas, ya?

Setuju, Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, baik.

Dengan kita sudah menyetujui, menyetujui kesimpulan ini, maka kita bisa sampai pada akhir rapat kita.

Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR/BPN yang sudah hadir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih

kepada Pak Menteri dan seluruhnya jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini.

Ini mungkin rapat kita yang terakhir, ya. Yang jelas terakhir bahas anggaran. Enggak tahu kalau ada yang lain lagi, ya. Karena, umur kami ini tinggal kurang lebih 3 minggu lagi.

Jadi, kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama kita selama ini. Dan kami, atas nama Pimpinan Komisi II, mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini atas kerja sama dan komunikasi kita. Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir pada kesempatan ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin*, maka rapat kerja ini kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.12 WIB)

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002